



**ANALISIS POTENSI SEKTOR EKONOMI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Farah Diar Iskandar**  
**NIM 130810101018**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**ANALISIS POTENSI SEKTOR EKONOMI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh  
**Farah Diar Iskandar**  
**NIM 130810101018**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Yuli Saptaning Utami dan Ayahanda Rachmad Iskandar, SH tercinta yang telah mendoakan, membimbing dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guru sejak TK sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

## MOTTO

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"*

(QS. Asy-Syarah : 5-6)

**“Hanya Kebodohan meremehkan Pendidikan”**

(P. Syrus)

**"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."**

(Thomas Alva Edhison)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farah Diar Iskandar

NIM : 130810101018

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 April 2018

Yang menyatakan,

Farah Diar Iskandar

NIM 130810101018

**SKRIPSI**

**ANALISIS POTENSI SEKTOR EKONOMI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh :  
Farah Diar Iskandar  
NIM 130810101018

**Pembimbing**

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Badjuri M.E  
Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sebastiana Viphindrartin M.Kes

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JudulSkripsi : Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Banyuwangi  
NamaMahasiswa : Farah Diar Iskandar  
NIM : 130810101018  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Regional  
Tanggal Persetujuan : 21 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Badjuri, M.E.  
NIP. 19531225 198403 1 002

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes  
NIP. 196411081989022001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes  
NIP. 196411081989022001

## PENGESAHAN

### Judul Skripsi

### **ANALISIS POTENSI SEKTOR EKONOMI KABUPATEN BANYUWANGI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Farah Diar Iskandar

NIM : 130810101018

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

20 April 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

#### Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dra. Anifatul Hanim, M.Si (.....)  
NIP. 19650730 199103 2001
2. Sekretaris : Dr. Endah Kurnia Lestari, SE, ME (.....)  
NIP. 19780414 200112 2003
3. Anggota : Drs. Sunlip Wibisono, M. Kes (.....)  
NIP. 19581206 198603 1003

Foto 4 X 6  
warna

Mengetahui/Menyetujui,  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA.  
NIP. 19710727 199512 1001



Analisis Potensi Sektor Ekonomi  
Kabupaten Banyuwangi

**Farah Diar Iskandar**

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui sektor yang menjadi prioritas unggulan untuk dapat dikembangkan sebagai penunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi (2) mengetahui karakteristik pertumbuhan ekonomi dilihat dari konsentrasi sektoral dan sub sektor di Kabupaten Banyuwangi (3) mengetahui sektor potensial apabila dilihat dari keterkaitan yang prospektif dihitung melalui alat analisis DLQ. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ), analisis Shift-Share (SS) dan analisis Dynamic Location. Hasil analisis SS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan di Provinsi. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat empat sektor basis dan tiga belas sektor non basis. Dari tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang potensial dari perhitungan analisis LQ dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan pada sektor ekonomi non basis sedangkan pada analisis DLQ terdapat delapan sektor prioritas di masa mendatang.

Kata Kunci: *Location Quotient (LQ), Shift-Share (SS)*

*Analysis of Potential Economic Sector of Banyuwangi Regency*

**Farah Diar Iskandar**

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and Business, University of Jember*

**ABSTRACT**

*This study aims to (1) know which sector is a priority to be developed to support economic growth improvement in Banyuwangi Regency (2) to know the characteristic of economic growth seen from sectoral and sub sectors concentration in Banyuwangi Regency (3) to know potential sector when viewed from a prospective linkage is calculated through a DLQ analysis tool. The analysis method used in this research is quantitative descriptive analysis using Location Quotient (LQ) analysis, Shift-Share (SS) analysis and Dynamic Location analysis. The result of SS analysis shows that economic growth in Banyuwangi Regency can be said to be slower than growth in Province. The result of LQ analysis shows that in Banyuwangi there are four basic sectors and thirteen non-base sectors. From 2011-2015 shows that the potential economic sectors of the LQ analysis calculation can absorb more labor than in non-base economic sectors whereas in the DLQ analysis there are eight priority sectors in the future.*

*Keyword : Location Quotient (LQ), Shift-Share (SS)*

## RINGKASAN

**Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Banyuwangi;** Farah Diar Iskandar; 130810101018: Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Jember.

Pembangunan Nasional di negara-negara berkembang pada umumnya, terfokus pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur antara lain melalui PDB pada tingkat nasional dan PDRB pada tingkat daerah baik Propinsi, Kabupaten maupun Kota. Pelaksanaan pembangunan Indonesia selama ini juga tidak terlepas dari pandangan tersebut. Pembangunan nasional mempunyai dampak atas pembangunan daerah, sebab daerah adalah bagian integral dari suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, rencana pembangunannya meliputi rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan dalam tataran regional. Pembangunan ekonomi nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah. UU No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula. Maka, kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya agar mampu mencapai hasil pembangunan yang optimal. Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhannya, dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya menggunakan PDRB. Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur merupakan daerah otonom yang memiliki andil dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui pencapaian pembangunan daerah. Keberhasilan akan pembangunan nasional yang juga didukung dari keberhasilan pembangunan daerah menjadi sangat penting bagi setiap pemerintah daerah termasuk Kabupaten Banyuwangi untuk selalu mendorong laju pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembangunan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan menjadikan masyarakat semakin sejahtera. Letak geografis Banyuwangi sangat strategis,

berada di ujung timur pulau. Selain itu sumber daya alam yang cukup melimpah tersedia di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Menurut data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah kabupaten Malang dan Jember. Sehingga tidak mengherankan apabila Kabupaten Banyuwangi menjadi bagian dari salah satu lumbung pangan di provinsi Jawa Timur. Selain potensi dibidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi memiliki bentangan pantai yang cukup panjang, sehingga ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat menjadi fokus perhatian pemerintah dalam meningkatkan sektor tersebut melalui berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut. Bukan hal yang tidak mungkin apabila percepatan pengembangan sektor - sektor potensial seperti kekayaan laut dan sektor potensial lainnya ini dapat segera terwujud mengingat potensi yang dimiliki cukup besar. Meskipun ekonomi Banyuwangi menunjukkan pergerakan yang stabil dan tumbuh meningkat, namun beban dan tantangan masih terbilang cukup tinggi. Perubahan pola sektoral ekonomi yang terjadi seperti telah dijelaskan diatas harus segera mendapat penanganan yang cepat dan tepat sehingga tidak terjadi kebijakan yang salah sasaran, apalagi mengingat saat ini di kawawasan Banyuwangi selatan telah ditemukan sumberdaya alam baru berupa tambang emas, yang kemungkinan bisa menjadi sektor unggulan baru. Penentuan sektor basis sangat perlu segera dilaksanakan untuk menentukan sektor mana yang akan mendorong peningkatan PDRB Banyuwangi dan akan menjadi penopang perekonomian. Identifikasi sektor basis yang akan diprioritaskan menjadi sangat penting untuk segera dikerjakan agar daerah dapat segera menggunakan potensi ekonominya secara maksimal.

## **PRAKATA**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Badjuri, M.E. selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing penulis untuk menyusun karya akhir yang baik dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih juga atas saran dan kritik membangun yang telah diberikan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Dr. Rafael Purতোমো Somaji, M. Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bantuan moril berupa motivasi, nasehat dan pengarahan, dalam membimbing penulis menempuh seluruh kegiatan akademik kampus sejak semester awal hingga semester akhir;
4. Ibu Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Jember;
5. Bapak Dr. M. Miqdad, S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Perpustakaan Pusat;

7. Ibunda Yuli Saptaning Utami dan Ayahanda Rachmad Iskandar, SH tercinta, selaku kedua orang tua, guru, dan adikku tercinta yang telah bekerja keras penuh dedikasi membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, keuletan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mendidik penulis hingga mampu mencapai pendidikan tinggi yang sekarang ini, terimakasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas doa, dukungan, kasih sayang, kerja keras, kesabaran dan pengorbanan selama ini;
8. Ahvin Satriyo Putra sebagai partner dari MABA
9. Saudara-saudaraku tercinta beserta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas doa, motivasi dan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti;
10. Semua sahabat-sahabatku IESP konsentrasi Regional angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih atas kenangan dan perjuangan yang sangat berharga bagi penulis.
11. Teman-teman alumni SMA Negeri 1 Glagah Banyuwangi angkatan 2010, terima kasih untuk semua pengalaman dan cerita yang berkesan, semoga jalinan pertemanan dan persahabatan tetap terjaga;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Aamiin.

Jember, 08 April 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>13</b>
2.1.1 Teori Pembangunan Daerah .....	<b>13</b>
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	<b>13</b>

a. Teori Pertumbuhan Klasik .....	13
b. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik .....	14
c. Teori Harrord Domar dalam Sistem Regional .....	14
2.1.3 Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah ....	15
2.1.4 Sektor Potensial Dalam Pengembangan Wilayah.....	16
2.1.5 Teori Basis Ekonomi.....	19
<b>2.2 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>22</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Rancangan Penelitian .....</b>	<b>27</b>
3.1.1 Jenis Penelitian .....	27
3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
3.1.3 Jenis dan Sumber Data .....	27
<b>3.2 Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>27</b>
<b>3.3 Definisi Operasional Variabel.....</b>	<b>27</b>
<b>3.4 Metode Analisis .....</b>	<b>28</b>
3.4.1 Metode Location Quotient .....	28
3.4.2 Metode Analisis <i>Shift Share</i> .....	29
3.4.3 Metode Dynamic Location Quotient .....	31
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
<b>4.1 Gambaran Umum .....</b>	<b>33</b>
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Banyuwangi .....	33
4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Banyuwangi .....	34
4.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banyuwangi .....	37
<b>4.2 Hasil Analisis Data .....</b>	<b>38</b>
4.2.1 Analisis Location Quotient (LQ) .....	38
4.2.2 Analisis <i>Shift-Share</i> .....	40
4.2.3 Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) .....	45



4.3 Pembahasan .....	47
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 PDRB Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2011-2015.....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk...	35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur .....	36
Tabel 4.3 Penduduk Berumur 15 tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Usaha.....	37
Tabel 4.4 Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Angkatan Kerja dan Pendidikan yang ditamatkan .....	37
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Analisis Location Quotient (LQ).....	39
Tabel 4.6 Komponen shift-share Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015) .....	40
Tabel 4.7 Komponen Pertumbuhan Proportional (Pj).....	42
Tabel 4.8 Komponen Differential (Dj).....	44
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Analisis Shift-Share .....	45
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)	46

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	26
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi .....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran A	PDRB Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (Milyar Rupiah)..... 66
Lampiran B	PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (Milyar Rupiah)..... 67
Lampiran C	Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (Persen)..... 68
Lampiran D	Laju Pertumbuhan PDRB Banyuwangi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (Persen)..... 69
Lampiran E	Tingkat Pertumbuhan Kabupaten Banyuwangi..... 70
Lampiran F	Tingkat Pertumbuhan Provinsi Jawa Timur..... 71
Lampiran G	Perhitungan National Share 2011/2012..... 72
Lampiran H	Perhitungan National Share 2012/2013..... 73
Lampiran I	Perhitungan National Share 2013/2014..... 74
Lampiran J	Perhitungan National Share 2014/2015..... 75
Lampiran K	Perhitungan National Share 2011/2015..... 76
Lampiran L	Perhitungan Proportional Shift 2011/2012..... 77
Lampiran M	Perhitungan Proportional Shift 2012/2013..... 78
Lampiran N	Perhitungan Proportional Shift 2013/2014..... 79
Lampiran O	Perhitungan Proportional Shift 2014/2015..... 80
Lampiran P	Perhitungan Proportional Shift 2011/2015..... 81
Lampiran Q	Perhitungan Differential Shift 2011/2012..... 82
Lampiran R	Perhitungan Differential Shift 2012/2013..... 83
Lampiran S	Perhitungan Differential Shift 2013/2014..... 84
Lampiran T	Perhitungan Differential Shift 2014/2015..... 85
Lampiran U	Perhitungan Differential Shift 2011/2015..... 86

Lampiran V	Perhitungan LQ Kabupaten Banyuwangi.....	87
Lampiran W	Kontribusi PDRB Banyuwangi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (Persen).....	88
Lampiran X	Perhitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015.....	89
Lampiran Y	Komponen shift-share Kabupaten Banyuwangi.....	90

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilaksanakan hampir semua bangsa-bangsa di dunia, karena pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha mencapai kemajuan bagi bangsa tersebut. Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk di dalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja (Widodo, 2006: 4). Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang.

(Todaro, 1997: 14) menyatakan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus pula berupaya untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk, karena dengan kesempatan kerja penduduk atau masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

(Arsyad, 1999: 108) menyatakan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah (daerah) dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja atau kesempatan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah) (Arsyad, 1999: 108). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Saat ini berkembang fenomena berkaitan dengan perubahan pola pembangunan ekonomi, yaitu pola kerja berjaringan (*networking*) dalam beragam aktivitas produktif, baik di sektor publik (antar pemerintah) dan bisnis, maupun dalam masyarakat secara umum. Ini hanya dapat berjalan jika masing-masing pihak sebagai simpul memiliki kompetensi yang makin terspesialisasi dan saling komplementatif, berkembangnya keterkaitan atas landasan (*platform*) bersama yang saling mendukung dan kuat, serta komitmen yang tinggi dan tindakan nyata yang menghasilkan sinergi positif (Taufik, 2006 : 53).

Pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah sendiri adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah atau wilayah tertentu (Arsyad, 1999 : 298).

Pembangunan nasional di negara-negara berkembang pada umumnya, terfokus pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur antara lain melalui PDB pada tingkat nasional dan PDRB pada tingkat daerah baik Propinsi, Kabupaten maupun Kota.

Pelaksanaan pembangunan Indonesia selama ini juga tidak terlepas dari pandangan tersebut. Pembangunan nasional mempunyai dampak atas pembangunan daerah, sebab daerah adalah bagian integral dari suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, rencana pembangunannya meliputi rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan dalam tataran regional. Pembangunan ekonomi nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan (Soeparmoko, 2002). Keberhasilan pembangunan ekonomi

daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien. Dalam penentuan kebijakan, haruslah memperhitungkan kondisi internal maupun perkembangan eksternal. Perbedaan kondisi internal dan eksternal hanyalah pada jangkauan wilayah, dimana kondisi internal meliputi wilayah daerah atau regional, sedangkan kondisi eksternal meliputi wilayah nasional.

Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia.

Sejak era reformasi tahun 1999 terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau disebut Otonomi daerah yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah (Armida, 2000). Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut .

Glasson (1990) mengatakan bahwa kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor utama. Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung pada usaha-usaha di daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha pembangunan



yang diperlukan. Oleh sebab itu maka kegiatan basis mempunyai peranan penggerak utama (*prime mover role*) dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional.

Berdasarkan teori basis ekonomi, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 1999). Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*). Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat karena disetiap daerah mempunyai keadaan yang berbeda, mempunyai karakteristik tersendiri, laju pertumbuhan ekonomi maupun potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat telah tercantum dalam GBHN 1999-2004, yaitu dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sejalan pula dengan isu lintas bidang yang tercantum dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004) bahwa untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan daerah dilakukan dengan konsep pembangunan lintas wilayah.

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (1988: 4) pembangunan adalah “upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat itu.” Jadi, pembangunan dimaksudkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yakni tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pencapaian pelaksanaan pembangunan yang diharapkan tersebut tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 menjadi reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal lahirnya otonomi daerah di Indonesia termasuk adanya desentralisasi fiskal. Adanya otonomi daerah mampu mendorong kegairahan daerah untuk mengembangkan perekonomiannya.

UU No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula. Maka, kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya agar mampu mencapai hasil pembangunan yang optimal. Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan ekonominya, dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya menggunakan PDRB.

Sebelum otonomi daerah, daerah belum bebas dalam menentukan sektor atau komoditi yang akan diprioritaskan. Namun setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menentukan sektor atau komoditi yang akan diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan atau kelemahan diwilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan dan prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Dengan pemberlakuan undang-undang tentang otonomi daerah diharapkan pertumbuhan pada masing-masing daerah menjadi lebih optimal dan mampu meningkatkan kemandirian daerah tersebut yang nantinya akan dapat mendongkrak pendapatan daerah tersebut. Pembangunan daerah yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan potensi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah maka pemanfaatan sumber daya yang ada

akan menjadi kurang maksimal dan optimal. Keadaan itu dapat memperlambat proses pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing.

Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber- sumber daya secara optimal.

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi.

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah juga sangat bermakna. Tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi daerah akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, Pemerintah Daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk membangun daerah yang kondusif, sehingga akan muncul kreasi dan inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Di

samping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya (Widjaja, 2005: 77).

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif dalam mengatur daerah. Pemda diharapkan mampu mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi wilayah dan SDA yang dimiliki daerahnya. Dengan begitu, akan mempermudah kerja Pemda dalam mengidentifikasi dan mengeksplor SDA yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah. Namun, dalam pemanfaatan SDA tersebut, Pemda juga harus memperhatikan aspek pemeliharaan untuk mengatasi adanya degradasi SDA. Dengan adanya pemeliharaan SDA, akan dimungkinkan kegiatan perekonomian daerah dapat terus berkelanjutan atau tidak hanya berhenti pada beberapa periode saja.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu daerah harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah adalah data mengenai PDRB atas dasar harga yang berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Suatu masyarakat dipandang mengalami suatu pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakat apabila pendapatan perkapita menurut harga atau pendapatan terus menerus bertambah.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan daerah. Daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan potensi daerahnya. (Glasson, 1990 dalam Nudiatulhuda, 2007) mengatakan bahwa kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor utama.

Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung pada usaha-usaha di daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha pembangunan yang diperlukan. Oleh sebab itu maka kegiatan basis mempunyai peranan penggerak utama (*prime mover role*) dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier

terhadap perekonomian regional. Berdasarkan teori basis ekonomi, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad,1999).

Untuk meningkatkan pendapatan daerah pada dewasa ini masing-masing daerah dituntut harus mampu berusaha sendiri untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalian potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah maka pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002).

Kabupaten lain meskipun mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang positif, untuk lebih meningkatkan PDRB agar hasilnya optimum diperlukan pemilihan sektor-sektor yang diprioritaskan sehingga dapat menggunakan potensi ekonomi daerah secara optimal terutama bagi daerah-daerah yang potensi dimilikinya belum dimanfaatkan secara baik. Sektor-sektor yang dapat diunggulkan oleh setiap daerah merupakan sektor basis, punya keunggulan kompetitif serta mempunyai spesialisasi bagi daerah yang bersangkutan.

Kajian mengenai potensi ekonomi berupa sektor-sektor unggulan ini sangat diperlukan untuk perencanaan pengembangan pembangunan yang akan datang terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana terjadinya pemekaran wilayah yang berdampak pada berubahnya potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah asalnya (wilayah induk ).

Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur merupakan daerah otonom yang memiliki andil dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui pencapaian pembangunan daerah. Keberhasilan akan pembangunan nasional yang juga didukung dari keberhasilan pembangunan daerah menjadi sangat penting bagi setiap pemerintah daerah termasuk Kabupaten Banyuwangi untuk selalu mendorong laju pembangunan baik

pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembangunan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan menjadikan masyarakat semakin sejahtera.

Letak geografis Banyuwangi sangat strategis, berada di ujung timur pulau Jawa dimana memiliki SDA yang cukup melimpah. Menurut data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah kabupaten Malang dan Jember.

Kabupaten Banyuwangi menjadi bagian dari salah satu lumbung pangan di provinsi Jawa Timur. Selain potensi dibidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi memiliki bentangan pantai yang cukup panjang, di sisi lain pengembangan sumberdaya kelautan dapat menjadi fokus perhatian pemerintah dalam meningkatkan sektor tersebut melalui berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut. Bukan hal yang tidak mungkin apabila percepatan pengembangan sektor - sektor potensial seperti kekayaan laut dan sektor potensial lainnya ini dapat segera terwujud mengingat potensi yang dimiliki cukup besar.

Menurut laporan Banyuwangi *Economic Outlook 2012 (Sectoral Analysis)*, sektor pertanian menjadi sektor andalan Banyuwangi, sumbangsihnya paling tinggi diantara sembilan sektor lainnya terhadap PDRB menjadikan sektor pertanian sebagai sektor unggulan di beberapa tahun terakhir. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran, meskipun dalam posisi kedua dalam memberi kontribusi ekonomi Banyuwangi, namun menjadi lokomotif utama yang mengangkat tumbuhnya perekonomian. Ketika sektor perdagangan, jasa, dan restoran serta sektor konstruksi mengalami trend peningkatan, sektor lainnya akan mengalami trend penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini Banyuwangi dalam proses transformasi, dari pertanian ke sektor jasa perdagangan. Sektor pertanian, di samping pertumbuhannya lambat, kontribusinya terhadap total PDRB semakin tahun semakin menurun.

Berikut adalah Tabel Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2015.

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), 2011-2015

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.056,04	12.927,75	13.677,35	14.286,44	14.958,59
Pertambangan dan Penggalian	3.258,90	3.348,15	3.373,69	3.514,25	3.689,70
Industri Pengolahan	4.019,32	4.244,06	4.517,95	4.830,28	5.133,73
Pengadaan Listrik dan Gas	19,87	21,40	22,08	23,50	25,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,98	26,15	27,94	28,68	30,21
Konstruksi	3.714,58	4.038,85	4.377,65	4.697,17	4.988,41
Perdagangan Besar dan eceran, Reparai Mobil dan Sepeda Motor	4.617,19	5.060,30	5.640,10	5.982,64	6.403,20
Transportasi dan Pergudangan	971,73	1.045,59	1.118,24	1.202,39	1.293,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan	726,57	787,55	851,10	938,99	1.042,92
Informasi dan Komunikasi	1.610,11	1.782,60	1.950,30	2.102,48	2.269,44
Jasa Keuangan dan Asuransi	573,20	624,52	695,38	737,96	793,26
Real Estate	508,67	544,83	590,06	647,82	691,60
Jasa Perusahaan	79,66	84,06	90,78	96,98	103,60
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	880,85	898,76	918,21	926,06	986,84
Jasa Pendidikan	1.110,85	1.230,48	1.278,77	1.343,63	1.432,13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,52	128,54	137,16	150,49	163,67
Jasa Lainnya	427,38	442,13	466,86	495,88	523,69
<b>Jumlah</b>	<b>34.720,43</b>	<b>37.235,74</b>	<b>39.733,62</b>	<b>42.005,65</b>	<b>44.529,93</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016, diolah.

Kabupaten Banyuwangi menunjukkan pergerakan yang stabil dan tumbuh meningkat, namun beban dan tantangan masih terbilang cukup tinggi. Perubahan pola sektoral ekonomi yang terjadi seperti telah dijelaskan diatas harus segera mendapat penanganan yang cepat dan tepat sehingga tidak terjadi kebijakan yang salah sasaran, apalagi mengingat saat ini di kawawasan Banyuwangi selatan telah ditemukan sumberdaya alam baru berupa tambang emas, yang kemungkinan bisa menjadi sektor unggulan baru. Penentuan sektor basis sangat perlu segera dilaksanakan untuk menentukan sektor mana yang akan mendorong peningkatan PDRB Banyuwangi dan akan menjadi penopang perekonomian. Identifikasi sektor basis yang akan diprioritaskan menjadi sangat penting untuk segera

dikerjakan agar daerah dapat segera menggunakan potensi ekonominya secara maksimal.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari pemaparan bahasan diatas maka diperlukan adanya suatu penelitian untuk mengetahui potensi ekonomi serta identifikasi sektor-sektor yang potensial dan sektor prioritas di Kabupaten Banyuwangi sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pem-bangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta di era otonomi daerah saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Sektor manakah yang menjadi prioritas unggulan untuk dapat dikembangkan sebagai penunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana karakteristik pertumbuhan ekonomi dilihat dari konsentrasi sektoral ?
3. Bagaimana sektor potensial apabila dilihat dari keterkaitan yang prospektif dihitung melalui alat analisis DLQ ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sektor yang menjadi prioritas unggulan untuk dapat dikembangkan sebagai penunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan ekonomi dilihat dari konsentrasi sektoral dan sub sektor
3. Untuk mengetahui sektor potensial apabila dilihat dari keterkaitan yang prospektif dihitung melalui alat analisis DLQ

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada teori ilmu ekonomi pembangunan terutama dalam meneliti analisis potensi sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Hasil



penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya yang melakukan penelitian dengan objek yang sama.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah :

1. Memudahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi ekonomi dan tipologi yang dimiliki tiap Kabupaten/Kota
2. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang kinerja masing-masing sektor.
3. Menambah referensi tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Pembangunan Daerah**

Salah satu aspek pembangunan wilayah (regional) adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur. Perubahan struktur ekonomi dapat berupa peralihan dari kegiatan perekonomian ke nonpertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi, serta perubahan status kerja buruh. Karena itu konsep pembangunan wilayah (regional) sangat tepat bila didukung dengan teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, pusat pertumbuhan dan teori spesialisasi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut ( Arsyad, 1999:108).

(Adisasmita, 2005), menyatakan bahwa Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. .

#### **2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2005 : 46).

Terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi daerah atau wilayah sebagai berikut :

##### **a. Teori Pertumbuhan Klasik**

Adam Smith adalah orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis. Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan yang

seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer. Sementara peranan pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban serta memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi. John Maynard Keynes mengoreksi pandangan Smith dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan moneter, dan pengawasan langsung.

#### **b. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik**

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh (Robert M. Solow, 1970) dari Amerika Serikat dan (TW. Swan, 1956) dari Australia. Menurut teori ini tingkat pertumbuhan berasal dari 3 sumber yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja dan peningkatan teknologi. Teori neo klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna perekonomian bisa tumbuh maksimal. Analisis lanjutan dari paham neo klasik menunjukkan bahwa terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat *s* (*saving*) yang pas dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali di wilayah itu.

#### **c. Teori Harrod-Domar dalam sistem regional**

Teori ini dikembangkan pada waktu yang hampir bersamaan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Teori ini didasarkan atas asumsi :

Perekonomian bersifat tertutup, hasrat menabung ( $MPs = s$ ) adalah konstan. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja ( $n$ ) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Atas dasar asumsi-asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar)

Di sisi lain Hoover (1977), menerangkan bahwa teori pertumbuhan regional berbasis ekspor merupakan beberapa aktivitas disuatu daerah adalah basic, dengan

kata lain pertumbuhannya menimbulkan serta menentukan pembangunan menyeluruh daerah tersebut. Sedangkan aktivitas-aktivitas lain (non-basic) merupakan konsekwensi dari pembangunan menyeluruhnya. Demikian pula menurut (Bendavid-Val, 1991), menyatakan bahwa semua pertumbuhan regional ditentukan oleh sektor basic, sedangkan sektor non-basic hanyalah yang mencakup aktivitas pendukung, seperti perdagangan, jasa-jasa perseorangan, produksi input untuk produk-produk di sektor basic, melayani industri-industri di sektor basic maupun pekerja-pekerja beserta keluarganya di sektor basic, atau menurut (Bachrul, 2004), dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan basis adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa diluar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Menurut model ini multiplier basis ekonomi dihitung menurut banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan.

### **2.1.3 Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah**

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002).

Telah diketahui bersama bahwa tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil perkapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, maka strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan usaha di daerah tersebut. Oleh karena itu langkah-langkah berikut dapat dijadikan acuan dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada didaerah, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan serta mencari factor-faktor penyebab rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3. Mengidentifikasi sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumberdaya manusianya yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.
4. Dengan model pembobotan terhadap variabel - variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan sub-sektor, maka akan ditemukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
5. Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang diharapkan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable development*).

#### **2.1.4 Sektor Potensial Dalam Pengembangan Wilayah**

Sektor ekonomi potensial atau sektor unggulan dapat diartikan sebagai sektor perekonomian atau kegiatan usaha yang produktif dikembangkan sebagai potensi pembangunan serta dapat menjadi basis perekonomian suatu wilayah dibandingkan sektor-sektor lainnya dalam suatu keterkaitan baik secara langsung maupun tak langsung (Tjokroamidjojo, 1993: 74).

Sektor ekonomi potensial ini dapat berupa sektor basis yang merupakan sektor yang mengekspor barang dan jasa ke wilayah-wilayah diluar batas-batas perekonomian setempat. Besarnya pendapatan pengeluaran dalam sektor basis merupakan fungsi dari permintaan wilayah-wilayah lain. Tingkat pendapatan yang diperoleh sektor basis tercermin dari tingkat produksinya, sehingga kemampuan produksi sektor basis menjadi faktor penentu pendapatan wilayah. Adapun untuk sektor non basis menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat setempat termasuk kebutuhan sektor basisnya. Peningkatan sektor basis ditentukan oleh

pembelanjaan pendapatan sektor basis baik berupa faktor-faktor produksi maupun barang dan jasa yang dibutuhkan pekerja sektor basis. Dengan demikian perkembangan sektor non basis tergantung pada perkembangan sektor basisnya. Perluasan kegiatan-kegiatan ekonomi disalurkan sektor basis kepada sektor-sektor non basis yang mendukungnya secara langsung maupun tidak langsung.

Keterkaitan langsung berupa aliran faktor-faktor produksi yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, modal dan jasa produksi. Keterkaitan tidak langsung berupa transaksi pengeluaran para pekerja sektor basis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan lokal yang melayani kebutuhan para pekerja tersebut turut terkena imbas perkembangan sektor basisnya, dengan demikian adanya keterkaitan yang kuat antara sektor basis dan sektor non basis merupakan syarat mutlak untuk menyebarluaskan pertumbuhan dalam wilayah.

Sektor ekonomi dapat disebut sebagai sektor potensial jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan sektor ekonomi yang dapat menjadi sektor basis wilayah, sehingga semakin besar barang dan jasa yang dapat diekspor maka semakin besar pula tingkat pendapatan yang diperoleh suatu wilayah.
2. Memiliki kemampuan daya saing (*competitive advantage*) yang relative baik dibanding sektor sejenis dari wilayah lain. Perkembangan sektor ini akan merangsang perkembangan sektor-sektor lain baik yang terkait langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian wilayah.
3. Memiliki sumberdaya yang dapat mendukung bagi pengembangannya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat ketersediaan sumber daya yang dimiliki maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan sektor ekonomi wilayah tersebut.

Persoalan pokok dalam pembangunan daerah sering terletak pada sumberdaya dan potensi yang dimiliki guna menciptakan peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada kerjasama Pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang tersedia dalam daerah dan diperlukan sebagai kekuatan untuk pembangunan perekonomian wilayah.

Pengembangan wilayah diartikan sebagai semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan pemerataan pembangunan dalam semua sektor dan pada seluruh bagian wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara serentak pada semua tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. Disebutkan juga bahwa investasi diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi dan dapat meningkatkan pendapatan wilayah dalam jangka waktu relatif singkat (Glasson, 1990). Dari definisi tersebut diatas dimaksudkan bahwa wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar akan berkembang lebih pesat, kemudian pengembangan wilayah tersebut akan merangsang wilayah sekitarnya. Bagi sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor lain yang kurang potensial.

Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor perekonomian yang potensi berkembangnya cukup besar. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor potensial tersebut. Perkembangan ekonomi suatu wilayah membangun suatu aktivitas perekonomian yang mampu tumbuh dengan pesat dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor lain sehingga membentuk forward linkage dan backward linkage. Pertumbuhan yang cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya secara tidak langsung sektor perekonomian lainnya akan mengalami perkembangan.

Jadi disimpulkan bahwa pengembangan suatu sektor ekonomi potensial dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor lain yang terkait, baik sebagai input bagi sektor potensial maupun sebagai imbas dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor potensial yang mengalami peningkatan pendapatan. Hal inilah yang memungkinkan pengembangan sektor potensial dilakukan sebagai langkah awal dalam pengembangan perekonomian wilayah dan pengembangan wilayah secara keseluruhan.

### 2.1.5 Teori Basis Ekonomi

Inti dari teori basis ekonomi menurut Arsyad (1999:166) dalam Sadau (2002: 20) menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation).

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut (Glasson, 1990) kegiatan-kegiatan Basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang jadi; luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal. Implisit didalam pembagian kegiatan-kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi.

Pendekatan basis ekonomi sebenarnya dilandasi pada pendapat bahwa yang perlu dikembangkan di sebuah wilayah adalah kemampuan memproduksi dan menjual hasil produksi tersebut secara efisien dan efektif. Lebih lanjut model ini menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah atas dua sektor, yaitu :

1. Sektor basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Itu berarti daerah secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain.
2. Sektor non basis, yaitu sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar daerah itu sendiri.

Berdasarkan teori ini, sektor basis perlu dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Inti dari teori ini adalah membedakan aktivitas sektor basis dengan aktivitas sektor non basis, dimana Sektor Basis yang ada pada suatu pusat pertumbuhan adalah sektor yang



pertumbuhannya dapat menentukan pembangunan secara menyeluruh pada daerah tersebut. Sektor non basis adalah sektor sekunder dalam arti sektor tumbuh akibat dari pembangunan yang menyeluruh di wilayah. Teori basis ekonomi ini berupaya menentukan sektor basis dari sebuah wilayah, kemudian dari penentuan sektor tertentu diramalkan aktivitas sektor yang dapat digunakan untuk menganalisa dampak tambahan dari aktivitas sektor terkait.

Basis ekonomi dari sebuah aktifitas terdiri atas aktivitas-aktivitas yang menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja dari suatu basis ekonomi sebuah daerah, dan semua pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sektor basis. pendapatan dan kesempatan kerja sektor basis sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekspor sektor basis tersebut. Hal ini mengakibatkan industri-industri yang berorientasi ekspor yang merupakan motor penggerak di wilayah pertumbuhan.

Sektor basis, diindikasikan oleh nilai Location Quotient ( $LQ > 1$ ). Sedangkan, Kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam wilayah perekonomian yang bersangkutan dan sektor-sektor non basis diindikasikan sebaliknya ( $LQ < 1$ ). Aktifitas basis berperan sebagai penggerak utama perekonomian suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain maka akan semakin maju pertumbuhan wilayah.

Permasalahan pembangunan pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa perkembangan daerah itu terjadi secara bersama-sama dengan investasi yang berbeda, kondisi daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain, faktor dasarnya adalah struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. Untuk menciptakan struktur perekonomian yang berimbang dan melalui pembangunan daerah agar pembangunan berlangsung disetiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977). Kegiatan basis mempunyai peranan

penggerak pertama (*Prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Pendekatan secara tidak langsung mengenai pemisahan antara kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat menggunakan salah satu ataupun gabungan dari tiga metode yaitu :

1. Menggunakan asumsi-asumsi atau metode arbeter sederhana

Mengasumsikan bahwa semua industri primer dan manufaktur adalah Basis, dan semua industri Jasa adalah bukan basis, metode tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam sesuatu kelompok industri bisa terdapat industri-industri yang menghasilkan barang yang sebagian di ekspor atau dijual kepada lokal atau keduanya.

2. Metode *Location Quotient* ( LQ ).

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi mana saja yang termasuk sektor basis atau berpotensi ekspor dan sektor mana yang bukan merupakan sektor basis (Tarigan, 2005). Menurut (Tarigan, 2005), jika LQ menunjukkan angka lebih dari satu ( $LQ > 1$ ) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis, dengan kata lain sektor tersebut berpotensi ekspor ke daerah lain atau ke luar negeri. Analisis LQ dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan PDRB sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Penggunaan LQ ini sangat sederhana dan banyak digunakan dalam analisis sektor-sektor basis dalam suatu daerah. Namun teknik ini mempunyai suatu kelemahan karena berasumsi bahwa permintaan di setiap daerah adalah identik dengan pola permintaan nasional, bahwa produktivitas tiap tenaga kerja di setiap daerah sektor regional adalah sama dengan produktivitas tiap tenaga kerja dalam industri nasional, dan bahwa perekonomian nasional merupakan suatu perekonomian tertutup. Sehingga perlu disadari bahwa Selera atau pola konsumsi dan anggota masyarakat itu berbeda-beda baik antar daerah maupun dalam suatu daerah, Tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang untuk setiap daerah berbeda, Bahan keperluan industri berbeda antar daerah. Walaupun teori ini mengandung kelemahan, namun sudah banyak studi empirik yang dilakukan dalam rangka usaha memisahkan sektor-sektor

basis - bukan basis. Disamping mempunyai kelemahan, metode ini juga mempunyai dua kebaikan penting, pertama ia memperhitungkan ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Kedua metode ini tidak mahal dan dapat diterapkan pada data historik untuk mengetahui trend (Prasetyo, 2001).

3. Metode ketiga, yakni kebutuhan minimum (*minimum requirements*) adalah modifikasi dari metode LQ dengan menggunakan distribusi minimum dari employment yang diperlukan untuk menopang industri regional dan bukannya distribusi rata-rata. Untuk setiap daerah yang pertama dihitung adalah persentase angkatan kerja regional yang dipekerjakan dalam setiap industri. Kemudian persentase itu diperbandingkan dengan perhitungan hal-hal yang bersifat kelainan dan persentase terkecil dipergunakan sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi industri tertentu. Persentase minimum ini dipergunakan sebagai batas dan semua employment di daerah-daerah lain yang lebih tinggi dari persentase dipandang sebagai employment basis. Proses ini dapat diulangi untuk setiap industri di daerah bersangkutan untuk memperoleh employment basis total. Dibandingkan dengan metode LQ, metode ini malahan lebih bersifat arbiter karena sangat tergantung pada pemilihan persentase minimum dan tingkat disagregasi-disagregasi yang terlalu terperinci malahan dapat mengakibatkan hampir semua sektor menjadi kegiatan basis atau ekspor. Teori basis ini mempunyai kebaikan mudah diterapkan, sederhana dan dapat menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah dan dampak umum dari perubahan-perubahan jangka pendek. Keterbatasan teori ini tidak terlalu ketat dan dapat menjadi landasan yang sangat bermanfaat bagi peramalan jangka pendek .

### **3.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai sektor basis telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti. Analisis yang digunakan sebagian besar adalah analisis shift-share dan LQ. Ada pula peneliti disamping menggunakan analisis shift-share dan LQ juga menggunakan analisis lain seperti klassen tipologi atau analisis LQ digabungkan

dengan klasen tipologi dan Logistik Regression. Secara lengkap penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian-penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Alat Penelitian	Judul dan Hasil Penelitian
1.	Sarwati, 2000	LQ, Shift-Share, Klasen Tipologi	<p><b>Judul:</b> Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi Regional Jawa Tengah periode 1985-1996</p> <p><b>Hasil Penelitian :</b> Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama kurun waktu 12 tahun rata-rata lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengalami berbagai fluktuasi, tipologi daerah termasuk kategori daerah pertumbuhan cepat. Sedang pendapatan perkapita lebih rendah dari pada pendapatan perkapita nasional, sektor andalan pada periode 1985-1996 adalah; sektor: pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa. Listrik, gas dan air bersih, secara umum struktur ekonomi Jawa Tengah ada beberapa sektor yang mempunyai peranan cukup besar terhadap peningkatan PDRB tapi koefisien LQ-nya selalu lebih kecil dari satu dan sektor pertanian cukup dominan dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah</p>
2.	Assadin dan Mansoer, 2001	LQ, Shift Share	<p><b>Judul:</b> Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Terapan Model Kebijakan Prioritas Sektor untuk Kalimantan Timur.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perkembangan kesempatan kerja, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi cenderung semakin membuka kesempatan kerja, laju pertumbuhan kesempatan kerja di Kalimantan Timur lebih tinggi dari pada propinsi lain, laju kesempatan kerja di daerah lebih cepat, sedang komponen daya kompetitif menunjukkan nilai negatif.</p>
3.	Aswandi dan Kuncoro, 2002	Analisis Tipologi Klasen, Analisis LQ, Log regresi	<p><b>Judul :</b> Evaluasi penetapan Kawasan Andalan; studi empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999</p> <p><b>Hasil Penelitian :</b> Pertimbangan penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan hanya mengacu pada pendapatan perkapita dan sub sektor unggulan yang ditunjukkan oleh</p>

			hasil analisa LQ dan model Logit. Pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan.
4.	Rudatin, B. 2003	Shift-share, LQ, Tipologi Klassen	<p><b>Judul:</b> Analisis Sektor Basis dalam Rangka pengembangan pembangunan wilayah studi kasus Kabupaten-kecamatan di Jawa Tengah tahun 1996-2001.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Hasil analisis LQ menunjukkan sektor pertanian sebagai sektor basis di 22 kabupaten dari 29 kabupaten yang ada. Dari 29 kabupaten hanya 2 kabupaten masuk dalam tipologi daerah maju dan cepat tumbuh (tipologi I). Tipologi II ada 4 kabupaten. Tipologi III ada 9 kabupaten. Tipologi IV ada 14 kabupaten. Prioritas pengembangan sektor pertanian pada 5 kabupaten. Sektor pertambangan dan penggalian pada 1 kabupaten. Sektor industri pada 2 kabupaten. Sektor listrik, gas dan air pada 2 kabupaten. Sektor bangunan pada 3 kabupaten. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada 1 kabupaten. Sektor pengangkutan dan komunikasi 1 kabupaten. Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan pada 4 kabupaten. Sektor jasa pada 3 kabupaten.</p>
5.	Radianto,E. 2003	Shift-share, LQ, Indeks spesialisasi regional	<p><b>Judul :</b> Evaluasi Pembangunan Regional Pasca Kerusakan di Maluku</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Seluruh Kabupaten/kota di Propinsi Maluku memiliki LQ &gt; 1 untuk beberapa subsektor lapangan usaha baik sebelum kerusakan dan krisis ekonomi maupun pada masa pemulihan dari kedua dampak tersebut . Dari hasil perhitungan indeks spesialisasi menunjukkan terjadi penurunan nilai rata-rata 0,30 tahun 1997 menjadi 0,28 pada tahun 2001. Penurunan tsb. Disebabkan oleh adanya penurunan nilai rata-rata indeks spesialisasi di kota Ambon, Kab.Maluku Tengah dan Kab. Pulau Buru.</p>

### 3.2 Kerangka Konseptual

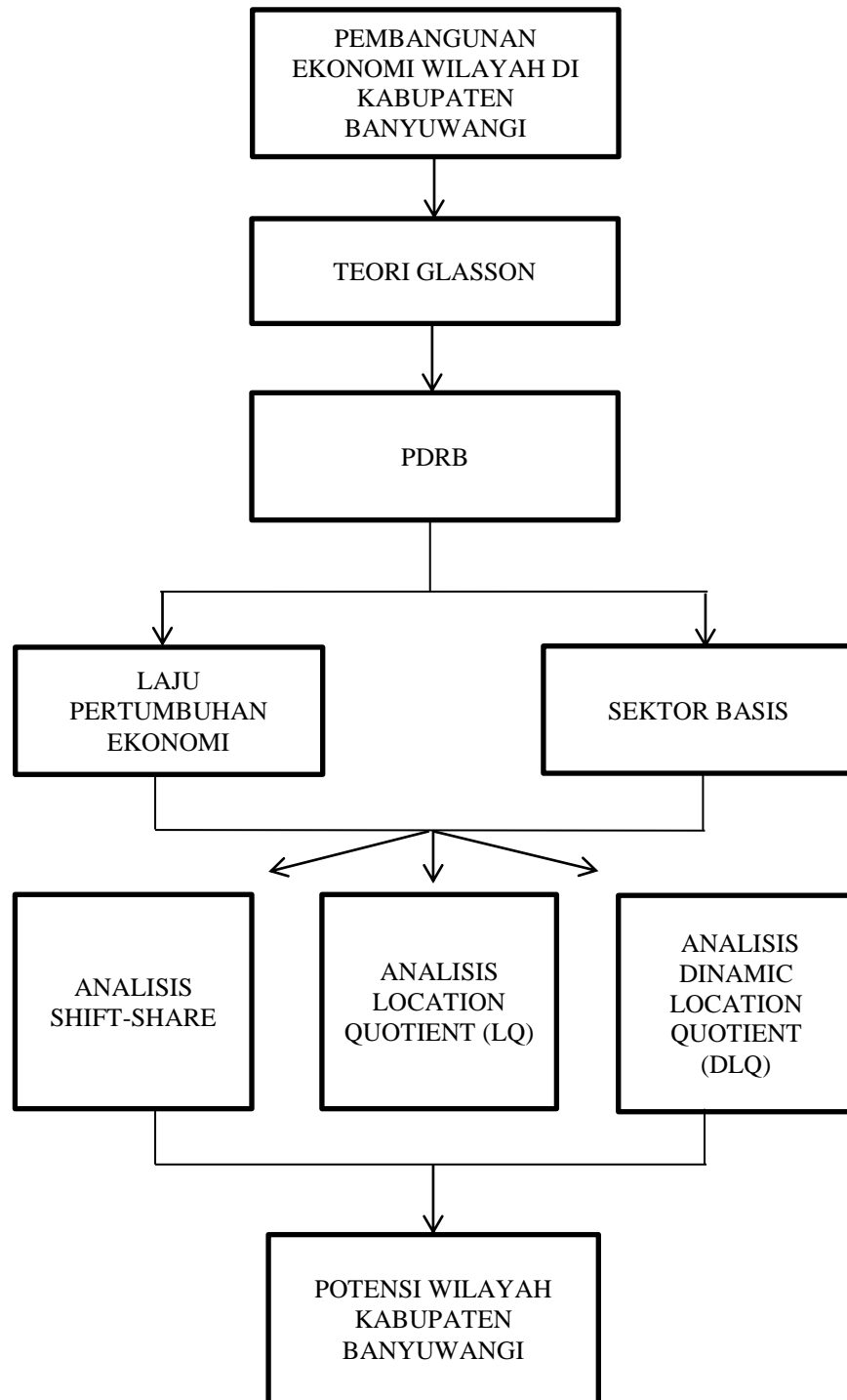
Pembangunan wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu upaya dalam kebijakan suatu proses pembangunan ekonomi. Potensi ekonomi yang

dimiliki suatu daerah dan kondisi geografi adalah faktor utama kemajuan daerah tersebut. Selain itu faktor produksi juga ikut serta menjadi pemicunya. Kebijakan pembangunan tersebut dapat diarahkan ke sektor-sektor yang potensial agar dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah dengan cepat.

Disini untuk melihat karakteristik suatu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan sektor potensinya digunakan dengan Teori Glasson. Yang mana kegiatan-kegiatan basis adalah kegiatan mengekspor barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya diluar perbatasan perekonomian masyarakatnya. Dari kerangka konsep dapat dijelaskan bahwa PDRB yang terurai dalam 17 sektor, laju pertumbuhan ekonomi dan juga sektor basis dapat menggambarkan suatu ukuran kinerja kegiatan ekonomi pada suatu daerah. Dan dari sektor tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga metode.

Untuk melihat karakteristik pertumbuhan ekonomi akan digunakan analisis shift-share yang mengidentifikasi sektor perekonomian kabupaten Banyuwangi dengan Provinsi Jawa Timur sebagai daerah referensi. Untuk menentukan sektor basis dan non basis maka digunakan alat analisis Location Quotient.

Dengan ketiga alat analisis tersebut akan dapat diidentifikasi sektor potensial Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Rancangan Penelitian**

#### **3.1.3 Jenis Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dimana keduanya dapat digabungkan dan jenis data yang terpakai dalam penelitian ini adalah penggabungan kedua jenis data tersebut. Adapun sumber data yang digunakan adalah memanfaatkan sumber data sekunder.

#### **3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BPS Banyuwangi yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi penelitian. Selain itu bertujuan agar hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan dapat dijadikan prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan Kabupaten Banyuwangi.

#### **3.1.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang sering terpakai dalam penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif dimana keduanya dapat digabungkan, dan jenis data yang terpakai dalam penelitian ini adalah penggabungan kedua jenis data tersebut. Adapun sumber data yang digunakan adalah memanfaatkan sumber data sekunder yang dipublikasikan oleh berbagai instansi atau lembaga terkait antara lain :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi
2. Buku Statistik Tahunan Indonesia serta berbagai jurnal ilmiah lainnya

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperoleh melalui telaah kepustakaan dan hasil publikasi. Adapun data yang dibutuhkan adalah :

- a. Data PDRB Kabupaten Banyuwangi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2011-2015
- b. Data PDRB Provinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2011-2015

### **3.3 Definisi Operasional Variabel**

Untuk memudahkan pengertian dan penafsiran konsep yang digunakan dalam analisis, maka beberapa batasan dari pengertian dasar atau konsep operasional dari variabel yang diamati dalam penelitian ini perlu diuraikan



### 1. PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto )

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Bila dipandang dari sudut produksi, PDRB merupakan jumlah nilai produksi neto barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam satu region atau wilayah selama jangka waktu tertentu yaitu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 sektor kelompok lapangan usaha.

### 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam persen pertahun. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pembangunan daerah dilihat dari besarnya pertumbuhan PDRB tiap tahunnya.

### 3. Sektor Ekonomi

Adalah jumlah pertumbuhan ekonomi per sektor Kabupaten Banyuwangi dan dibandingkan dengan per sektor di Provinsi Jawa Timur dalam milyar rupiah. Dan terdapat tujuh belas sektor ekonomi di masing-masing Kabupaten atau kota.

## 3.4 Metode Analisis

### 3.4.1 Metode Analisis Location Quotient (LQ)

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Location Quotient yang bertujuan untuk membandingkan besarnya peranan suatu sektor disuatu daerah terhadap peranan suatu sektor tersebut secara nasional atau di suatu kabupaten terhadap peranan suatu sektor secara regional atau tingkat provinsi. Untuk mengetahui sektor potensial di suatu daerah, alat analisis yang digunakan adalah dengan melihat nilai Location Quotients (LQ), yang merupakan perbandingan kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyuwangi dengan PDRB Provinsi Jawa Timur

1. Jika nilai  $LQ > 1$  maka sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor potensial (basis).

2. Jika nilai  $LQ < 1$  maka sektor tersebut bukan merupakan sektor potensial (non basis).
3. Jika  $LQ = 1$  maka tingkat spesialisasi kabupaten / kota sama dengan di tingkat propinsi

Melalui data PDRB atas dasar harga konstan analisis yang digunakan dengan rumus sbb. :

$$LQ = \frac{\frac{x_i}{PDRB}}{\frac{X_i}{PNB}}$$

Dimana :

$x_i$  = Nilai tambah sektor i di suatu daerah yang dianalisis

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto daerah yang dianalisis

$X_i$  = Nilai tambah sektor i secara nasional

PNB = Produk Nasional Bruto / GNP

Dari analisa ini diharapkan didapat sektor-sektor basis di masing-masing kabupaten/kota se Jawa Timur yang pertumbuhannya dapat dipacu guna meningkatkan pertumbuhan PDRB kabupaten/kota yang bersangkutan.

### 3.4.2 Metode Analisis Shift-Share (SS)

Analisis *Shift Share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Analisis ini bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (Robinson Tarigan, 2005). Untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan analisis *Shift Share* digunakan variabel penting seperti tenaga kerja, penduduk dan pendapatan. Dalam analisis ini digunakan variabel pendapatan yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, dapat diuraikan menjadi komponen *Shift* dan Komponen *Share* yaitu (Robinson Tarigan, 2005) :

a. Komponen *National Share* ( $N_s$ )

adalah banyaknya penambahan PDRB kab/kota seandainya pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Propinsi selama periode yang tercakup dalam studi.

b. Komponen *Proportional shift* ( $P$ )

mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat ( $P > 0$ ) dan negatif ( $P < 0$ ) di daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot.

c. Komponen *Differential shift* ( $D$ )

mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dibandingkan dengan tingkat provinsi yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. Daerah yang mempunyai keuntungan lokasional, seperti sumber daya yang baik akan mempunyai *differential shift component* yang positif ( $D > 0$ ), sebaliknya daerah yang tidak memiliki keuntungan lokasional akan mempunyai *differential shift component* yang negative ( $D < 0$ )

Pada dasarnya analisis *shift share* digunakan untuk melihat perubahan lapangan kerja total atau PDRB total dari suatu wilayah analisis berdasarkan komponen *shift* dan komponen *share*-nya berdasarkan periode tertentu sesuai dengan waktu yang digunakan. Karena pada analisis ini digunakan data PDRB tahun 2011-2015 berdasarkan harga konstan tahun 2010, maka analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan PDRB total dari daerah analisis (Kabupaten Banyuwangi) jika dilihat dari komponen *shift* dan *share* nya. Komponen *share* disini adalah nilai *National Share* ( $N_s$ ) yaitu komponen yang menunjukkan banyaknya perubahan PDRB Kabupaten seandainya proporsi pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode studi (dari tahun 2011 sampai tahun 2015). Sedangkan komponen *shift* adalah penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertumbuhan nilai PDRB di wilayah analisis

yang dapat dilihat dari nilai komponen *Proportional Share* dan *Differential Shift*-nya. Sehingga pertambahan nilai PDRB suatu sektor dapat diperinci dari nilai *National Share*, *Proportional Shift* dan *Differential Shift* atau jika dirumuskan :

$$\Delta E_{r,i,t} = (N_{s,i} + P_{r,i} + D_{r,i}).$$

Dimana :

- a.  $\Delta E_{r,i,t}$  merupakan besarnya perubahan nilai PDRB suatu sektor dari tahun akhir (t) yaitu tahun 2015 dengan tahun dasar atau awal (t-n) yaitu tahun 2011 pada wilayah analisis, Dalam hal ini merupakan selisish nilai PDRB suatu sektor Kabupaten Banyuwangi antara tahun 2015 dengan tahun 2011. Dirumuskan,  $\Delta E_{r,i,t} = E_{r,i,t} - E_{r,i,t-n}$
- b.  $N_{s,i}$  merupakan besarnya nilai National Share
- c.  $P_{r,i}$  merupakan besarnya nilai Proportional Shift
- d.  $D_{r,i}$  merupakan besarnya nilai Differential Shift

### 3.4.3 Metode Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) sebagai alternatif untuk melengkapi kelemahan analisis LQ maka digunakan analisis DLQ. Metode ini digunakan untuk mengetahui peranan sektor prioritas di masa mendatang. Untuk menghitung nilai DLQ dapat digunakan rumus sebagai berikut (Yuwono, 1999) :

$$DLQ = \left[ \frac{(1 + G_{in}) / (1 + G_n)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right]$$

Dimana :

- DLQ = Indeks *Dynamic Location Quotient*  
 $G_{in}$  = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten Banyuwangi  
 $G_n$  = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Banyuwangi  
 $G_i$  = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di Provinsi Jawa Timur  
 $G$  = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur

Dari hasil perhitungan DLQ dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Jika  $DLQ > 1$ , maka proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi lebih cepat dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama terhadap laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur.

2. Jika  $DLQ = 1$ , maka proporsi laju pertumbuhan sektor  $i$  terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama terhadap laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur.
3. Jika  $DLQ < 1$ , maka proporsi laju pertumbuhan sektor  $i$  terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi lebih rendah dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama terhadap laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur.

## BAB 5. PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan penelitian terkait dengan hasil analisis penelitian dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai saran dan rekomendasi kebijakan pemerintah terhadap pengaruhnya sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis shift-share tersebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan di Provinsi.
2. Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) tersebut bahwa sektor potensial yang ada di Kabupaten Banyuwangi diantaranya adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor konstruksi; dan sektor jasa pendidikan.
3. Berdasarkan hasil analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) diketahui bahwa ada beberapa sektor prioritas di masa mendatang ( $DLQ > 1$ ) di Kabupaten Banyuwangi yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, dan sektor Jasa Lainnya. Sedangkan sektor yang merupakan bukan sektor prioritas di masa mendatang ( $DLQ < 1$ ) di Kabupaten Banyuwangi yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

### 5.2 Saran

Terlepas bahwa dalam penelitian ini lebih banyak mengandalkan data sekunder dengan segala keterbatasannya, maka ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan pengembangan

potensi ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada saat mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang strategis ataupun potensial dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonominya hendaknya juga tidak mengabaikan peran sektor yang tergolong non potensial. Karena dengan pengembangan sektor potensial diharapkan akan dapat merangsang pertumbuhan sektor non potensial sehingga menjadi sektor potensial yang pada akhirnya semua sektor ekonomi bersama-sama mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alisjahbana, Armida S. 2000. *Manajemen Otonomi Daerah: Implementasi Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Solusi dan Evaluasi Kritis Masa Depan Ekonomi Indonesia” diselenggarakan Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan. Bandung.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE UGM, Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Asaddin F. dan Mansoer, F.W. 2001. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Terapan Model Kebijakan Prioritas Sektorial Untuk Kalimantan Timur*. Jurnal Riset Akuntansi, manajemen, Ekonomi Vol 1. No.1, Februari 2001 hal. 89-103.
- Aswandi H. dan Kuncoro M. 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 17. No 1. 2002.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015. Analisis Sektor Basis Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Studi Kasus Kabupaten-Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 1996-2001*: Tesis S2, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015*. Provinsi Jawa Timur.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta. BPFE-UGM.
- Glasson John. 1990. *Pengenalan Perancangan Wilayah Konsep dan Amalan* (alih bahasa Ahris Yaakup). Dewan bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur.



- Glasson John. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta : Terjemahan Paul Sihotang.
- Hoover, Edwin M. 1977. *An Introduction to Regional Economics*. (1 st ed.). New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Indah Dwi Ariastuti. 2014. *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Purbalingga Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB Periode 2007-2011*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Dipublikasikan.
- Latif Adam. 1994. *Aplikasi Model Shift-Share Analysis di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol.II. No.1. The Indonesian Institute of Sciences (PEP-LIPI) Jakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan* (1 st ed.). UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kalster Industri Indonesia*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nasrul Fakhris Nurfansyah. 2011. *Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Jember*. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Dipublikasikan
- Nudiatulhuda. 2007. *Analisis Potensi Ektonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Tengah*. Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro: Program Pasca Sarjana.
- Prapto, Yuwono. 1999. *Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU 22/1999 dan UU 25/1999*. Kritis. Volume XII. Salatiga.
- Prasetyo Soepono. 2001. *Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (eksport) Posisi dan Sumbangannya bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.16 No.1.
- Prasetyo Soepono. 1993. *Analisis Shft-Share: Perkembangan dan Penerapan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol 1 Tahun VIII.
- Radianto E. 2003. *Evaluasi Pembangunan Regional Pasca Kerusakan di Maluku*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol. 51 (4) hal. 479-499.

- Rahardjo Adisasmita. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Richardson Harry.,W. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. (terjemahan: Paul Sitohang). LPFE-UI. Jakarta.
- Rudatin B. 2003. *Analisis Sektor Basis Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Studi Kasus Kabupaten-Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 1996-2001*. Tesis S2, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang., Tidak dipublikasikan.
- Sadau, A. 2002. *Identifikasi Sektor Ekonomi dan Prospek Pembangunan daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten apuas Hulu 1995-1999*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada
- Sarwati, Y.Y.N. 2000. *Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi Regional Jawa Tengah periode 1985-1996*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Dipublikasikan.
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma. LP3ES No.3 Tahun XXVI. Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Soeparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi pertama. Andi. Yogyakarta.
- Tarigan. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Taufik. 2006. *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman*. Jakarta: Rajawali Press.
- Todaro.,M.P. 1997. *Economic Development*. Six Edition. Edinbourg Gate Harlow Addition Wesley Longman. New York University.
- Todaro.,M.P. 2000. *Economic Development (7th ed.)* New York; Addition Wesley Longman, Inc.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1993. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Masagung.
- Widodo, Tri. 2006. *Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN

Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Rangka sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Yusuf Maulana. 1999. *Model Ratio Pertumbuhan (MRP) sebagai salah satu alat Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol XLVII No.2.

**Lampiran A : PDRB Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (Milyar Rupiah)**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.056,04	12.927,75	13.677,35	14.286,44	14.958,59
Pertambangan dan Penggalian	3.258,90	3.348,15	3.373,69	3.514,25	3.689,70
Industri Pengolahan	4.019,32	4.244,06	4.517,95	4.830,28	5.133,73
Pengadaan Listrik dan Gas	19,87	21,40	22,08	23,50	25,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,98	26,15	27,94	28,68	30,21
Konstruksi	3.714,58	4.038,85	4.377,65	4.697,17	4.988,41
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.617,19	5.060,30	5.640,10	5.982,64	6.403,20
Transportasi dan Pergudangan	971,73	1.045,59	1.118,24	1.202,39	1.293,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan	726,57	787,55	851,10	938,99	1.042,92
Informasi dan Komunikasi	1.610,11	1.782,60	1.950,30	2.102,48	2.269,44
Jasa Keuangan dan Asuransi	573,20	624,52	695,38	737,96	793,26
Real Estate	508,67	544,83	590,06	647,82	691,60
Jasa Perusahaan	79,66	84,06	90,78	96,98	103,60
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	880,85	898,76	918,21	926,06	986,84
Jasa Pendidikan	1.110,85	1.230,48	1.278,77	1.343,63	1.432,13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,52	128,54	137,16	150,49	163,67
Jasa Lainnya	427,38	442,13	466,86	495,88	523,69
<b>Jumlah</b>	<b>34.720,43</b>	<b>37.235,74</b>	<b>39.733,62</b>	<b>42.005,65</b>	<b>44.529,93</b>

**Lampiran B : PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (Milyar Rupiah)**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	138870,09	146002,57	150463,72	155924,12	160907,33
Pertambangan dan Penggalian	58140,33	58287,95	59049,99	61204,89	65707,01
Industri Pengolahan	306072,36	326681,77	345794,56	372267,1	393272,95
Pengadaan Listrik dan Gas	4404,97	4259,04	4382,32	4489,61	4455,27
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1171,31	1182,01	1231,05	1234,13	1299,27
Konstruksi	95157,73	102250,92	110485,45	116498,23	120688,27
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	190771,67	206433,67	219199,95	229303,84	243014,66
Transportasi dan Pergudangan	29399,87	31528,72	34241,21	36433,43	38896,63
Penyediaan Akomodasi dan Makan	51667,02	54601,23	57684,94	62807,8	67657,04
Informasi dan Komunikasi	51881,62	58299,18	65313,95	69455,1	73639,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	24088,32	26668,02	30444,56	32561,85	34730,26
Real Estate	17737,71	19153,83	20565,06	21998,29	23092,64
Jasa Perusahaan	8156,66	8416,88	9044,15	9815	10349,05
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	27823,81	28210,09	28564,75	28729,58	30236,25
Jasa Pendidikan	26494,05	28789,37	31265,46	33290,69	35330,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6353,04	7033,06	7592,82	8212,85	8743,34
Jasa Lainnya	16211,2	16666,33	17517,93	18473,7	19374,39
<b>Jumlah</b>	<b>1054401,76</b>	<b>1124464,64</b>	<b>1192841,87</b>	<b>1262700,21</b>	<b>1331394,99</b>

**Lampiran C : Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (Persen)**

No	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,02	5,14	3,06	3,53	3,46	3,84
2	Pertambangan dan Penggalian	7,63	0,25	1,31	3,11	7,92	4,04
3	Industri Pengolahan	4,57	6,73	5,85	7,79	5,30	6,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,94	-3,31	2,85	2,78	-3,00	-0,52
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,87	0,91	4,15	0,25	5,28	3,89
6	Konstruksi	6,09	7,45	8,05	5,44	3,60	6,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,16	8,21	6,21	4,78	6,00	6,87
8	Transportasi dan Pergudangan	8,56	7,24	8,60	6,46	6,56	7,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	9,70	5,68	5,65	8,88	7,91	7,56
10	Informasi dan Komunikasi	9,11	12,37	12,03	5,88	6,49	9,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,14	10,71	13,80	6,76	7,19	9,52
12	Real Estate	8,78	7,98	7,37	6,97	4,97	7,21
13	Jasa Perusahaan	4,92	3,19	7,45	8,52	5,44	5,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	4,86	1,39	1,26	0,58	5,38	2,69
15	Jasa Pendidikan	6,21	8,66	8,60	6,53	6,26	7,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,45	10,70	7,96	8,17	6,46	10,15
17	Jasa Lainnya	3,70	2,81	5,11	5,46	4,88	4,39

**Lampiran D : Laju Pertumbuhan PDRB Banyuwangi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015  
(Persen)**

No	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,50	7,23	5,80	4,23	4,58	5,27
2	Pertambangan dan Penggalian	7,06	2,74	0,76	4,48	4,68	3,94
3	Industri Pengolahan	5,93	5,59	6,45	7,05	6,36	6,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,59	7,66	3,21	2,86	3,27	4,92
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,75	4,67	6,84	2,64	5,32	5,44
6	Konstruksi	10,12	8,73	8,39	7,30	6,76	8,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,34	9,60	11,46	6,07	7,18	8,73
8	Transportasi dan Pergudangan	8,69	7,60	6,95	8,22	8,04	7,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	9,08	8,39	8,07	10,33	11,40	9,45
10	Informasi dan Komunikasi	8,35	10,71	9,41	7,51	7,56	8,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,37	8,95	11,35	6,12	7,49	8,46
12	Real Estate	6,47	7,11	8,30	9,79	6,76	7,69
13	Jasa Perusahaan	6,68	5,53	7,99	6,82	6,83	6,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	5,91	2,03	2,16	0,86	6,56	3,50
15	Jasa Pendidikan	13,19	10,77	3,92	5,07	6,35	7,86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,41	6,65	6,71	12,71	5,87	8,87
17	Jasa Lainnya	5,86	3,45	5,59	6,22	5,61	5,35

### Lampiran E : Tingkat Pertumbuhan Kabupaten Banyuwangi

Lapangan Usaha	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	871,71	749,60	609,09	672,15	725,64
Pertambangan dan Penggalian	89,25	25,55	140,56	175,45	107,70
Industri Pengolahan	224,74	273,89	312,34	303,45	278,60
Pengadaan Listrik dan Gas	1,52	0,69	1,42	1,57	1,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,17	1,79	0,74	1,53	1,31
Konstruksi	324,27	338,80	319,52	291,24	318,46
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	443,12	579,80	342,53	420,56	446,50
Transportasi dan Pergudangan	73,85	72,66	84,15	91,46	80,53
Penyediaan Akomodasi dan Makan	60,98	63,54	87,90	103,92	79,09
Informasi dan Komunikasi	172,49	167,69	152,18	166,96	164,83
Jasa Keuangan dan Asuransi	51,32	70,86	42,58	55,30	55,02
Real Estate	36,17	45,22	57,77	43,78	45,73
Jasa Perusahaan	4,40	6,72	6,20	6,63	5,99
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	17,91	19,45	7,85	60,78	26,50
Jasa Pendidikan	119,64	48,28	64,86	88,50	80,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,01	8,62	13,33	13,17	10,79
Jasa Lainnya	14,75	24,72	29,02	27,82	24,08
<b>Jumlah</b>	<b>2.515,31</b>	<b>2.497,88</b>	<b>2.272,03</b>	<b>2.524,28</b>	<b>2.452,37</b>



### Lampiran F : Tingkat Pertumbuhan Provinsi Jawa Timur

Lapangan Usaha	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7132,48	4461,15	5460,40	4983,21	5509,31
Pertambangan dan Penggalian	147,62	762,04	2154,90	4502,12	1891,67
Industri Pengolahan	20609,41	19112,79	26472,54	21005,85	21800,15
Pengadaan Listrik dan Gas	-145,93	123,28	107,29	-34,34	12,58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,70	49,04	3,08	65,14	31,99
Konstruksi	7093,19	8234,53	6012,78	4190,04	6382,64
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15662,00	12766,28	10103,89	13710,82	13060,75
Transportasi dan Pergudangan	2128,85	2712,49	2192,22	2463,20	2374,19
Penyediaan Akomodasi dan Makan	2934,21	3083,71	5122,86	4849,24	3997,51
Informasi dan Komunikasi	6417,56	7014,77	4141,15	4184,86	5439,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	2579,70	3776,54	2117,29	2168,41	2660,49
Real Estate	1416,12	1411,23	1433,23	1094,35	1338,73
Jasa Perusahaan	260,22	627,27	770,85	534,05	548,10
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	386,28	354,66	164,83	1506,67	603,11
Jasa Pendidikan	2295,32	2476,09	2025,23	2039,98	2209,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	680,02	559,76	620,03	530,49	597,58
Jasa Lainnya	455,13	851,60	955,77	900,69	790,80
<b>Jumlah</b>	<b>70062,88</b>	<b>68377,23</b>	<b>69858,34</b>	<b>68694,78</b>	<b>69248,31</b>

### Lampiran G : Perhitungan National Share 2011/2012

Lapangan Usaha	$E_{r,t,t-n}$	$E_{N,t}/E_{N,t-n}$	(c)	National share
	(a)	(b)	(a)x(b)	(c)-(a)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.056,04	1,07	12857,14	801,10
Pertambangan dan Penggalian	3.258,90	1,07	3475,44	216,55
Industri Pengolahan	4.019,32	1,07	4286,40	267,08
Pengadaan Listrik dan Gas	19,87	1,07	21,19	1,32
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,98	1,07	26,64	1,66
Konstruksi	3.714,58	1,07	3961,41	246,83
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.617,19	1,07	4923,99	306,80
Transportasi dan Pergudangan	971,73	1,07	1036,30	64,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan	726,57	1,07	774,85	48,28
Informasi dan Komunikasi	1.610,11	1,07	1717,10	106,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	573,20	1,07	611,29	38,09
Real Estate	508,67	1,07	542,47	33,80
Jasa Perusahaan	79,66	1,07	84,95	5,29
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	880,85	1,07	939,38	58,53
Jasa Pendidikan	1.110,85	1,07	1184,66	73,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,52	1,07	128,53	8,01
Jasa Lainnya	427,38	1,07	455,78	28,40
<b>Jumlah</b>	<b>34.720,43</b>	<b>18,13</b>	<b>37027,53</b>	<b>2.307,10</b>

### Lampiran H : Perhitungan National Share 2012/2013

Lapangan Usaha	$E_{r,t-n}$	$E_{N,t}/E_{N,t-n}$	(c)	National share
	(a)	(b)	(a)x(b)	(c)-(a)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.927,75	1,06	13713,87	786,12
Pertambangan dan Penggalian	3.348,15	1,06	3551,74	203,60
Industri Pengolahan	4.244,06	1,06	4502,14	258,08
Pengadaan Listrik dan Gas	21,40	1,06	22,70	1,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,15	1,06	27,74	1,59
Konstruksi	4.038,85	1,06	4284,45	245,60
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.060,30	1,06	5368,02	307,71
Transportasi dan Pergudangan	1.045,59	1,06	1109,17	63,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan	787,55	1,06	835,44	47,89
Informasi dan Komunikasi	1.782,60	1,06	1891,00	108,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	624,52	1,06	662,50	37,98
Real Estate	544,83	1,06	577,96	33,13
Jasa Perusahaan	84,06	1,06	89,17	5,11
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	898,76	1,06	953,41	54,65
Jasa Pendidikan	1.230,48	1,06	1305,31	74,82
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,54	1,06	136,35	7,82
Jasa Lainnya	442,13	1,06	469,02	26,89
<b>Jumlah</b>	<b>37.235,74</b>	<b>18,03</b>	<b>39499,99</b>	<b>2.264,26</b>

### Lampiran I : Perhitungan National Share 2013/2014

Lapangan Usaha	$E_{r,t,t-n}$	$E_{N,t}/E_{N,t-n}$	(c)	National share
	(a)	(b)	(a)x(b)	(c)-(a)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.677,35	1,06	14478,36	801,01
Pertambangan dan Penggalian	3.373,69	1,06	3571,27	197,58
Industri Pengolahan	4.517,95	1,06	4782,54	264,59
Pengadaan Listrik dan Gas	22,08	1,06	23,38	1,29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,94	1,06	29,58	1,64
Konstruksi	4.377,65	1,06	4634,02	256,38
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.640,10	1,06	5970,41	330,31
Transportasi dan Pergudangan	1.118,24	1,06	1183,73	65,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan	851,10	1,06	900,94	49,84
Informasi dan Komunikasi	1.950,30	1,06	2064,52	114,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	695,38	1,06	736,10	40,72
Real Estate	590,06	1,06	624,61	34,56
Jasa Perusahaan	90,78	1,06	96,10	5,32
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	918,21	1,06	971,99	53,77
Jasa Pendidikan	1.278,77	1,06	1353,66	74,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,16	1,06	145,19	8,03
Jasa Lainnya	466,86	1,06	494,20	27,34
<b>Jumlah</b>	<b>39.733,62</b>	<b>18,00</b>	<b>42060,60</b>	<b>2.326,98</b>

**Lampiran J : Perhitungan National Share 2014/2015**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>E<sub>RL, t-n</sub></b>	<b>E<sub>N,t</sub>/E<sub>N, t-n</sub></b>	<b>(c)</b>	<b>National share</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(a)x(b)</b>	<b>(c)-(a)</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.286,44	1,05	15063,67	777,23
Pertambangan dan Penggalian	3.514,25	1,05	3705,43	191,19
Industri Pengolahan	4.830,28	1,05	5093,07	262,78
Pengadaan Listrik dan Gas	23,50	1,05	24,78	1,28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28,68	1,05	30,24	1,56
Konstruksi	4.697,17	1,05	4952,71	255,54
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.982,64	1,05	6308,11	325,47
Transportasi dan Pergudangan	1.202,39	1,05	1267,80	65,41
Penyediaan Akomodasi dan Makan	938,99	1,05	990,08	51,08
Informasi dan Komunikasi	2.102,48	1,05	2216,86	114,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	737,96	1,05	778,11	40,15
Real Estate	647,82	1,05	683,07	35,24
Jasa Perusahaan	96,98	1,05	102,25	5,28
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	926,06	1,05	976,45	50,38
Jasa Pendidikan	1.343,63	1,05	1416,72	73,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150,49	1,05	158,68	8,19
Jasa Lainnya	495,88	1,05	522,86	26,98
<b>Jumlah</b>	<b>42.005,65</b>	<b>17,92</b>	<b>44290,89</b>	<b>2.285,24</b>

**Lampiran K : Perhitungan National Share 2011/2015**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b><math>E_{r,t,t-r}</math></b>	<b><math>E_{N,t}/E_{N,t-r}</math></b>	<b>(c)</b>	<b>National share</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(a)x(b)</b>	<b>(c)-(a)</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.056,04	1,26	15223,19	3.167,14
Pertambangan dan Penggalian	3.258,90	1,26	4115,01	856,12
Industri Pengolahan	4.019,32	1,26	5075,21	1.055,88
Pengadaan Listrik dan Gas	19,87	1,26	25,10	5,22
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,98	1,26	31,55	6,56
Konstruksi	3.714,58	1,26	4690,41	975,83
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.617,19	1,26	5830,13	1.212,94
Transportasi dan Pergudangan	971,73	1,26	1227,01	255,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan	726,57	1,26	917,45	190,87
Informasi dan Komunikasi	1.610,11	1,26	2033,09	422,98
Jasa Keuangan dan Asuransi	573,20	1,26	723,78	150,58
Real Estate	508,67	1,26	642,30	133,63
Jasa Perusahaan	79,66	1,26	100,59	20,93
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	880,85	1,26	1112,25	231,40
Jasa Pendidikan	1.110,85	1,26	1402,67	291,82
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,52	1,26	152,18	31,66
Jasa Lainnya	427,38	1,26	539,66	112,27
<b>Jumlah</b>	<b>34.720,43</b>	<b>21,47</b>	<b>43841,55</b>	<b>9.121,12</b>

### Lampiran L : Perhitungan Proportional Shift 2011/2012

Lapangan Usaha	$E_{r,I,t-n}$	$E_{N,I,t} / E_{N,I,t-n}$	$E_{N,t} / E_{N,t-n}$	(d)	Proportional Shift
	(a)	(b)	(c)	(b)-(c)	(a)x(d)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.056,04	1,05	1,07	-0,02	-181,89
Pertambangan dan Penggalian	3.258,90	1,00	1,07	-0,06	-208,27
Industri Pengolahan	4.019,32	1,07	1,07	0,00	3,57
Pengadaan Listrik dan Gas	19,87	0,97	1,07	-0,10	-1,98
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,98	1,01	1,07	-0,06	-1,43
Konstruksi	3.714,58	1,07	1,07	0,01	30,06
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.617,19	1,08	1,07	0,02	72,26
Transportasi dan Pergudangan	971,73	1,07	1,07	0,01	5,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan	726,57	1,06	1,07	-0,01	-7,02
Informasi dan Komunikasi	1.610,11	1,12	1,07	0,06	92,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	573,20	1,11	1,07	0,04	23,30
Real Estate	508,67	1,08	1,07	0,01	6,81
Jasa Perusahaan	79,66	1,03	1,07	-0,03	-2,75
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	880,85	1,01	1,07	-0,05	-46,30
Jasa Pendidikan	1.110,85	1,09	1,07	0,02	22,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,52	1,11	1,07	0,04	4,89
Jasa Lainnya	427,38	1,03	1,07	-0,04	-16,40
<b>Jumlah</b>	<b>34.720,43</b>	<b>17,96</b>	<b>18,13</b>	<b>-0,17</b>	<b>-204,76</b>

### Lampiran M : Perhitungan Proportional Shift 2012/2013

Lapangan Usaha	$E_{r,t,t-n}$	$E_{N,I,t} / E_{N,I,t-n}$	$E_{N,t} / E_{N,t-n}$	(d)	Proportional Shift
	(a)	(b)	(c)	(b)-(c)	(a)x(d)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.927,75	1,05	1,07	-0,02	-195,04
Pertambangan dan Penggalian	3.348,15	1,00	1,07	-0,06	-213,98
Industri Pengolahan	4.244,06	1,07	1,07	0,00	3,76
Pengadaan Listrik dan Gas	21,40	0,97	1,07	-0,10	-2,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,15	1,01	1,07	-0,06	-1,50
Konstruksi	4.038,85	1,07	1,07	0,01	32,69
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.060,30	1,08	1,07	0,02	79,19
Transportasi dan Pergudangan	1.045,59	1,07	1,07	0,01	6,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan	787,55	1,06	1,07	-0,01	-7,61
Informasi dan Komunikasi	1.782,60	1,12	1,07	0,06	102,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	624,52	1,11	1,07	0,04	25,38
Real Estate	544,83	1,08	1,07	0,01	7,29
Jasa Perusahaan	84,06	1,03	1,07	-0,03	-2,90
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	898,76	1,01	1,07	-0,05	-47,24
Jasa Pendidikan	1.230,48	1,09	1,07	0,02	24,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,54	1,11	1,07	0,04	5,22
Jasa Lainnya	442,13	1,03	1,07	-0,04	-16,97
<b>Jumlah</b>	<b>37.235,74</b>	<b>17,96</b>	<b>18,13</b>	<b>-0,17</b>	<b>-200,70</b>



### Lampiran N : Perhitungan Proportional Shift 2013/2014

Lapangan Usaha	$E_{r,I,t-n}$	$E_{N,I,t} / E_{N,I,t-n}$	$E_{N,t} / E_{N,t-n}$	(d)	Proportional Shift
	(a)	(b)	(c)	(b)-(c)	(a)x(d)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.677,35	1,05	1,07	-0,02	-206,35
Pertambangan dan Penggalian	3.373,69	1,00	1,07	-0,06	-215,61
Industri Pengolahan	4.517,95	1,07	1,07	0,00	4,01
Pengadaan Listrik dan Gas	22,08	0,97	1,07	-0,10	-2,20
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,94	1,01	1,07	-0,06	-1,60
Konstruksi	4.377,65	1,07	1,07	0,01	35,43
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.640,10	1,08	1,07	0,02	88,27
Transportasi dan Pergudangan	1.118,24	1,07	1,07	0,01	6,67
Penyediaan Akomodasi dan Makan	851,10	1,06	1,07	-0,01	-8,22
Informasi dan Komunikasi	1.950,30	1,12	1,07	0,06	111,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	695,38	1,11	1,07	0,04	28,26
Real Estate	590,06	1,08	1,07	0,01	7,90
Jasa Perusahaan	90,78	1,03	1,07	-0,03	-3,14
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	918,21	1,01	1,07	-0,05	-48,27
Jasa Pendidikan	1.278,77	1,09	1,07	0,02	25,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,16	1,11	1,07	0,04	5,57
Jasa Lainnya	466,86	1,03	1,07	-0,04	-17,91
<b>Jumlah</b>	<b>39.733,62</b>	<b>17,96</b>	<b>18,13</b>	<b>-0,17</b>	<b>-189,73</b>

### Lampiran O : Perhitungan Proportional Shift 2014/2015

Lapangan Usaha	$E_{r,I,t-n}$	$E_{N,I,t} / E_{N,I,t-n}$	$E_{N,t} / E_{N,t-n}$	(d)	Proportional Shift
	(a)	(b)	(c)	(b)-(c)	(a)x(d)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.286,44	1,05	1,07	-0,02	-215,54
Pertambangan dan Penggalian	3.514,25	1,00	1,07	-0,06	-224,59
Industri Pengolahan	4.830,28	1,07	1,07	0,00	4,28
Pengadaan Listrik dan Gas	23,50	0,97	1,07	-0,10	-2,34
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28,68	1,01	1,07	-0,06	-1,64
Konstruksi	4.697,17	1,07	1,07	0,01	38,02
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.982,64	1,08	1,07	0,02	93,63
Transportasi dan Pergudangan	1.202,39	1,07	1,07	0,01	7,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan	938,99	1,06	1,07	-0,01	-9,07
Informasi dan Komunikasi	2.102,48	1,12	1,07	0,06	120,36
Jasa Keuangan dan Asuransi	737,96	1,11	1,07	0,04	29,99
Real Estate	647,82	1,08	1,07	0,01	8,67
Jasa Perusahaan	96,98	1,03	1,07	-0,03	-3,35
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	926,06	1,01	1,07	-0,05	-48,68
Jasa Pendidikan	1.343,63	1,09	1,07	0,02	27,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150,49	1,11	1,07	0,04	6,11
Jasa Lainnya	495,88	1,03	1,07	-0,04	-19,03
<b>Jumlah</b>	<b>42.005,65</b>	<b>17,96</b>	<b>18,13</b>	<b>-0,17</b>	<b>-188,88</b>

### Lampiran P : Perhitungan Proportional Shift 2011/2015

Lapangan Usaha	$E_{r,I,t-n}$	$E_{N,I,t} / E_{N,I,t-n}$	$E_{N,t} / E_{N,t-n}$	(d)	Proportional Shift
	(a)	(b)	(c)	(b)-(c)	(a)x(d)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.056,04	1,05	1,07	-0,02	-181,89
Pertambangan dan Penggalian	3.258,90	1,00	1,07	-0,06	-208,27
Industri Pengolahan	4.019,32	1,07	1,07	0,00	3,57
Pengadaan Listrik dan Gas	19,87	0,97	1,07	-0,10	-1,98
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,98	1,01	1,07	-0,06	-1,43
Konstruksi	3.714,58	1,07	1,07	0,01	30,06
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.617,19	1,08	1,07	0,02	72,26
Transportasi dan Pergudangan	971,73	1,07	1,07	0,01	5,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan	726,57	1,06	1,07	-0,01	-7,02
Informasi dan Komunikasi	1.610,11	1,12	1,07	0,06	92,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	573,20	1,11	1,07	0,04	23,30
Real Estate	508,67	1,08	1,07	0,01	6,81
Jasa Perusahaan	79,66	1,03	1,07	-0,03	-2,75
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	880,85	1,01	1,07	-0,05	-46,30
Jasa Pendidikan	1.110,85	1,09	1,07	0,02	22,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,52	1,11	1,07	0,04	4,89
Jasa Lainnya	427,38	1,03	1,07	-0,04	-16,40
<b>Jumlah</b>	<b>34.720,43</b>	<b>17,96</b>	<b>18,13</b>	<b>-0,17</b>	<b>-204,76</b>

**Lampiran Q : Perhitungan Differential Shift 2011/2012**

Lapangan Usaha	E r, I, t	E N, I, t / E N,I, t-n	E r, I, t-n	(d)	Differential Shift
	(a)	(b)	(c)	(b)x(c)	(a)-(d)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.927,75	1,05	12.056,04	12.675,25	252
Pertambangan dan Penggalian	3.348,15	1,00	3.258,90	3.267,17	81
Industri Pengolahan	4.244,06	1,07	4.019,32	4.289,96	-46
Pengadaan Listrik dan Gas	21,40	0,97	19,87	19,22	2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,15	1,01	24,98	25,21	1
Konstruksi	4.038,85	1,07	3.714,58	3.991,47	47
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.060,30	1,08	4.617,19	4.996,25	64
Transportasi dan Pergudangan	1.045,59	1,07	971,73	1.042,10	3
Penyediaan Akomodasi dan Makan	787,55	1,06	726,57	767,84	20
Informasi dan Komunikasi	1.782,60	1,12	1.610,11	1.809,27	-27
Jasa Keuangan dan Asuransi	624,52	1,11	573,20	634,58	-10
Real Estate	544,83	1,08	508,67	549,28	-4
Jasa Perusahaan	84,06	1,03	79,66	82,20	2
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	898,76	1,01	880,85	893,08	6
Jasa Pendidikan	1.230,48	1,09	1.110,85	1.207,08	23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,54	1,11	120,52	133,42	-5
Jasa Lainnya	442,13	1,03	427,38	439,38	3
<b>Jumlah</b>	<b>37.235,74</b>	<b>17,96</b>	<b>34.720,43</b>	<b>36.822,77</b>	<b>413</b>

### Lampiran R : Perhitungan Differential Shift 2012/2013

Lapangan Usaha	E r, I, t	E N, I, t / E N,I, t-n	E r, I, t-n	(d)	Differential Shift
	(a)	(b)	(c)	(b)x(c)	(a)-(d)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.677,35	1,05	12.056,04	12.675,25	1.002,10
Pertambangan dan Penggalian	3.373,69	1,00	3.258,90	3.267,17	106,52
Industri Pengolahan	4.517,95	1,07	4.019,32	4.289,96	227,98
Pengadaan Listrik dan Gas	22,08	0,97	19,87	19,22	2,87
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,94	1,01	24,98	25,21	2,73
Konstruksi	4.377,65	1,07	3.714,58	3.991,47	386,18
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.640,10	1,08	4.617,19	4.996,25	643,85
Transportasi dan Pergudangan	1.118,24	1,07	971,73	1.042,10	76,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan	851,10	1,06	726,57	767,84	83,26
Informasi dan Komunikasi	1.950,30	1,12	1.610,11	1.809,27	141,02
Jasa Keuangan dan Asuransi	695,38	1,11	573,20	634,58	60,80
Real Estate	590,06	1,08	508,67	549,28	40,78
Jasa Perusahaan	90,78	1,03	79,66	82,20	8,58
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	918,21	1,01	880,85	893,08	25,13
Jasa Pendidikan	1.278,77	1,09	1.110,85	1.207,08	71,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,16	1,11	120,52	133,42	3,74
Jasa Lainnya	466,86	1,03	427,38	439,38	27,48
<b>Jumlah</b>	<b>39.733,62</b>	<b>17,96</b>	<b>34.720,43</b>	<b>36.822,77</b>	<b>2910,849168</b>

### Lampiran S : Perhitungan Differential Shift 2013/2014

Lapangan Usaha	E r, I, t	E N, I, t / E N,I, t-n	E r, I, t-n	(d)	Differential Shift
	(a)	(b)	(c)	(b)x(c)	(a)-(d)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.286,44	1,05	12.056,04	12.675,25	1.611,19
Pertambangan dan Penggalian	3.514,25	1,00	3.258,90	3.267,17	247,08
Industri Pengolahan	4.830,28	1,07	4.019,32	4.289,96	540,32
Pengadaan Listrik dan Gas	23,50	0,97	19,87	19,22	4,29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28,68	1,01	24,98	25,21	3,46
Konstruksi	4.697,17	1,07	3.714,58	3.991,47	705,70
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.982,64	1,08	4.617,19	4.996,25	986,38
Transsportasi dan Pergudangan	1.202,39	1,07	971,73	1.042,10	160,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan	938,99	1,06	726,57	767,84	171,16
Informasi dan Komunikasi	2.102,48	1,12	1.610,11	1.809,27	293,21
Jasa Keuangan dan Asuransi	737,96	1,11	573,20	634,58	103,38
Real Estate	647,82	1,08	508,67	549,28	98,54
Jasa Perusahaan	96,98	1,03	79,66	82,20	14,78
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	926,06	1,01	880,85	893,08	32,99
Jasa Pendidikan	1.343,63	1,09	1.110,85	1.207,08	136,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150,49	1,11	120,52	133,42	17,07
Jasa Lainnya	495,88	1,03	427,38	439,38	56,50
<b>Jumlah</b>	<b>42.005,65</b>	<b>17,96</b>	<b>34.720,43</b>	<b>36.822,77</b>	<b>5182,88106</b>

**Lampiran T : Perhitungan Differential Shift 2014/2015**

Lapangan Usaha	E r, I, t	E N, I, t / E N, I, t-n	E r, I, t-n	(d)	Differential Shift
	(a)	(b)	(c)	(b)x(c)	(a)-(d)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.958,59	1,05	12.056,04	12.675,25	2.283,34
Pertambangan dan Penggalian	3.689,70	1,00	3.258,90	3.267,17	422,53
Industri Pengolahan	5.133,73	1,07	4.019,32	4.289,96	843,77
Pengadaan Listrik dan Gas	25,07	0,97	19,87	19,22	5,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,21	1,01	24,98	25,21	5,00
Konstruksi	4.988,41	1,07	3.714,58	3.991,47	996,94
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.403,20	1,08	4.617,19	4.996,25	1.406,95
Transportasi dan Pergudangan	1.293,85	1,07	971,73	1.042,10	251,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.042,92	1,06	726,57	767,84	275,08
Informasi dan Komunikasi	2.269,44	1,12	1.610,11	1.809,27	460,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	793,26	1,11	573,20	634,58	158,68
Real Estate	691,60	1,08	508,67	549,28	142,32
Jasa Perusahaan	103,60	1,03	79,66	82,20	21,40
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	986,84	1,01	880,85	893,08	93,77
Jasa Pendidikan	1.432,13	1,09	1.110,85	1.207,08	225,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163,67	1,11	120,52	133,42	30,24
Jasa Lainnya	523,69	1,03	427,38	439,38	84,31
<b>Jumlah</b>	<b>44.529,93</b>	<b>17,96</b>	<b>34.720,43</b>	<b>36.822,77</b>	<b>7707,16</b>

**Lampiran U : Perhitungan Differential Shift 2011/2015**

Lapangan Usaha	E r, I, t	E N, I, t / E N,I, t-n	E r, I, t-n	(d)	Differential Shift
	(a)	(b)	(c)	(b)x(c)	(a)-(d)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.056,04	1,05	12.056,04	12.675,25	-619,21
Pertambangan dan Penggalian	3.258,90	1,00	3.258,90	3.267,17	-8,27
Industri Pengolahan	4.019,32	1,07	4.019,32	4.289,96	-270,64
Pengadaan Listrik dan Gas	19,87	0,97	19,87	19,22	0,66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,98	1,01	24,98	25,21	-0,23
Konstruksi	3.714,58	1,07	3.714,58	3.991,47	-276,89
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.617,19	1,08	4.617,19	4.996,25	-379,06
Transportasi dan Pergudangan	971,73	1,07	971,73	1.042,10	-70,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan	726,57	1,06	726,57	767,84	-41,26
Informasi dan Komunikasi	1.610,11	1,12	1.610,11	1.809,27	-199,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	573,20	1,11	573,20	634,58	-61,39
Real Estate	508,67	1,08	508,67	549,28	-40,61
Jasa Perusahaan	79,66	1,03	79,66	82,20	-2,54
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	880,85	1,01	880,85	893,08	-12,23
Jasa Pendidikan	1.110,85	1,09	1.110,85	1.207,08	-96,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,52	1,11	120,52	133,42	-12,90
Jasa Lainnya	427,38	1,03	427,38	439,38	-12,00
<b>Jumlah</b>	<b>34.720,43</b>	<b>17,96</b>	<b>34.720,43</b>	<b>36.822,77</b>	<b>-2102,341007</b>



### Lampiran V : Perhitungan LQ Kabupaten Banyuwangi

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	LQ Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,64	2,67	2,73	2,75	2,78	2,71
Pertambangan dan Penggalian	1,70	1,73	1,72	1,73	1,68	1,71
Industri Pengolahan	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,15
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,65	0,67	0,68	0,70	0,70	0,68
Konstruksi	1,19	1,19	1,19	1,21	1,24	1,20
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,73	0,74	0,77	0,78	0,79	0,76
Transportasi dan Pergudangan	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,43	0,44	0,44	0,45	0,46	0,44
Informasi dan Komunikasi	0,94	0,92	0,90	0,91	0,92	0,92
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	0,71	0,69	0,68	0,68	0,70
Real Estate	0,87	0,86	0,86	0,89	0,90	0,87
Jasa Perusahaan	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,96	0,96	0,97	0,97	0,98	0,97
Jasa Pendidikan	1,27	1,29	1,23	1,21	1,21	1,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,58	0,55	0,54	0,55	0,56	0,56
Jasa Lainnya	0,80	0,80	0,80	0,81	0,81	0,80
<b>Jumlah</b>	<b>15,32</b>	<b>15,39</b>	<b>15,33</b>	<b>15,48</b>	<b>15,55</b>	<b>15,41</b>



**Lampiran X : Perhitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015**

No	Lapangan Usaha	Gin	Gi	Gn	G	1+Gin	1+Gi	1+Gn	1+G	DLQ
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,27	3,84	117,39	101,65	6,27	4,84	118,39	102,65	1,12
2	Pertambangan dan Penggalian	3,94	4,04	117,39	101,65	4,94	5,04	118,39	102,65	0,85
3	Industri Pengolahan	6,28	6,05	117,39	101,65	7,28	7,05	118,39	102,65	0,90
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	-0,52	117,39	101,65	5,92	0,48	118,39	102,65	10,69
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,44	3,89	117,39	101,65	6,44	4,89	118,39	102,65	1,14
6	Konstruksi	8,26	6,13	117,39	101,65	9,26	7,13	118,39	102,65	1,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,73	6,87	117,39	101,65	9,73	7,87	118,39	102,65	1,07
8	Transportasi dan Pergudangan	7,90	7,48	117,39	101,65	8,90	8,48	118,39	102,65	0,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	9,45	7,56	117,39	101,65	10,45	8,56	118,39	102,65	1,06
10	Informasi dan Komunikasi	8,71	9,18	117,39	101,65	9,71	10,18	118,39	102,65	0,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	9,52	117,39	101,65	9,46	10,52	118,39	102,65	0,78
12	Real Estate	7,69	7,21	117,39	101,65	8,69	8,21	118,39	102,65	0,92
13	Jasa Perusahaan	6,77	5,90	117,39	101,65	7,77	6,90	118,39	102,65	0,98
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,50	2,69	117,39	101,65	4,50	3,69	118,39	102,65	1,06
15	Jasa Pendidikan	7,86	7,25	117,39	101,65	8,86	8,25	118,39	102,65	0,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,87	10,15	117,39	101,65	9,87	11,15	118,39	102,65	0,77
17	Jasa Lainnya	5,35	4,39	117,39	101,65	6,35	5,39	118,39	102,65	1,02

**Lampiran Y : Komponen shift-share Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Gj</b>	<b>Nj</b>	<b>Gj-Nj</b>
2011-2012	2.515,31	70062,88	-67.547,57
2012-2013	2.497,88	68377,23	-65.879,35
2013-2014	2.272,03	69858,34	-67.586,31
2014-2015	2.524,28	68694,78	-66.170,50